

**ANALISIS KEEFEKTIFAN PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**



DIAJUKAN OLEH:

NAMA: MUHAMMAD RIF'AN JAILANI

NIM: 126222005

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI AKUNTAN

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS TARUMANAGARA

JAKARTA

2023

LAPORAN TUGAS AKHIR

**ANALISIS KEEFEKTIFAN PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**



DIAJUKAN OLEH:

NAMA: MUHAMMAD RIF'AN JAILANI

NIM: 126222005

**UNTUK MEMENUHI SALAH SATU SYARAT
UNTUK KELULUSAN PADA PROGRAM STUDI
PENDIDIKAN PROFESI AKUNTAN**

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI AKUNTAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA
2023**

**ANALISIS KEEFEKTIFAN PENGENDALIAN INTERNAL
TERHADAP LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

Laporan Tugas Akhir

Disusun oleh :



Muhammad Rif'an Jailani
126222005

Disetujui oleh :

Pembimbing



F.X. Kurniawan Tjakrawala, S.E., M.Si., Ak., CA

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah menilai efektifitas dan mengevaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Pemerintah Kabupaten Lampung Timur sekaligus mengidentifikasi penyebab temuan sistem pengendalian intern pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran (TA) 2022. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan menggunakan data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari kuesioner SPIP yang diisi oleh pejabat yang berwenang dan wawancara. Data Sekunder diperoleh dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) LKPD Kabupaten Lampung Timur TA 2022. Hasil dari penelitian ini adalah penerapan SPIP pada Pemerintah Kabupaten Lampung Timur secara keseluruhan telah efektif. Keempat komponen pengendalian yaitu lingkungan pengendalian, aktivitas pengendalian, informasi dan teknologi, serta pemantauan mendapatkan skor efektivitas diantara 2,34 – 3,00 sehingga menunjukkan bahwa keempat komponen tersebut telah efektif. Namun, skor pada komponen penilaian risiko menunjukkan angka 2,10 yang berarti komponen tersebut belum sepenuhnya efektif. Hasil identifikasi jenis temuan Sistem Pengendalian Intern pada LHP LKPD Kabupaten Lampung Timur menunjukkan bahwa masih terdapat kelemahan pada komponen penilaian risiko, aktivitas pengendalian, dan informasi dan komunikasi, sehingga perlu adanya penguatan dan penerapan sistem pengendalian intern pada tiga komponen tersebut.

Kata Kunci: Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Temuan Sistem Pengendalian Intern

ABSTRACT

This research aims to assess the effectiveness and evaluate the Government Internal Control System (SPIP) in the East Lampung Regency Government as well as identify the causes of the findings of the internal control system in Financial Report of the East Lampung Regency Regional Government (LKPD) for Fiscal Year 2022. This research uses a qualitative descriptive method using primary and secondary data. Primary data was obtained from the SPIP questionnaire filled out by authorized officials and interviews. Secondary data was obtained from the Audit Report (LHP) on LKPD for Fiscal Year 2022. The results of this research are that the implementation of SPIP in the East Lampung Regency Government as a whole has been effective. The four control components, namely control environment, control activities, information and technology, and monitoring, received effectiveness scores between 2.34 – 3.00, thus indicating that these four components are effective. However, the score on the risk assessment component is 2.10, which means the component is not fully effective. The results of identifying types of Internal Control System findings in the LHP LKPD of East Lampung Regency show that there are still weaknesses in the components of risk assessment, control activities, and information and communication, so there is a need to strengthen and implement the internal control system in these three components.

Keywords: *Government's Internal Control System, Local Government's Financial Report, Internal Control System findings*

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah Subhanahuwata'ala atas segala berkat dan kekuatan yang telah diberikan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Tugas akhir ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dari Program Studi Pendidikan Profesi Akuntan (PPA) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tarumanagara.

Penulis telah banyak mendapat bimbingan, bantuan dan dukungan dari berbagai pihak dalam melaksanakan penulisan tugas akhir ini. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Keluarga yang telah memberikan dukungan dan semangat selama proses perkuliahan hingga menyelesaikan penulisan tugas akhir ini;
2. Prof. Dr. Ir. Agustinus Purna Irawan, I.P.U., ASEAN Eng. selaku Ketua Rektor Universitas Tarumanagara.
3. Dr. Sawidji Widoatmojo, S.E., M.M., MBA selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tarumanagara.
4. Dr. Jamaludin Iskak, S.E., M.Si., Ak., CA, CPA, CPI, ASEAN CPA selaku Ketua Program Studi PPAk FEB Universitas Tarumanagara.
5. F. X. Kurniawan Tjakrawala, S.E., M.Si., Ak., CA selaku Dosen Pembimbing yang telah membantu serta telah meluangkan waktunya untuk membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
6. Seluruh dosen, staf, dan karyawan di Program Studi PPA Universitas Tarumanagara yang telah membantu selama proses perkuliahan serta telah memberikan ilmu dan pengetahuan dalam penulis menyelesaikan tugas akhir ini.
7. Teman-teman dan sahabat yang telah memberikan semangat dan dukungannya.

Selain itu penulis berharap agar tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dari berbagai kalangan. Penulis juga mengucapkan permohonan maaf jika selama proses penyusunan tugas akhir banyak melakukan kesalahan, baik lisan maupun tulisan, yang dilakukan secara disengaja maupun tidak disengaja.

Jakarta, Desember 2023

Muhammad Rif'an Jailani

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	5
1.3. Tujuan Penelitian	5
1.4. Manfaat Penelitian	5
1.5. Sistematika Pembahasan	6
BAB II LANDASAN TEORI	7
2.1. Kajian Teori	7
2.2. Tinjauan Pustaka	13
BAB III METODE PENELITIAN.....	15
3.1. Objek Penelitian.....	15
3.2. Metode Penelitian	17
BAB IV PEMBAHASAN.....	19
4.1 Hasil	19
4.2. Pembahasan.....	20
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	29
5.1. Simpulan	29
5.2. Saran	30
DAFTAR PUSTAKA	31

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Pendapatan Kabupaten Lampung Timur Tahun 2020-2023

Tabel 2 Pengisian Kuesioner

Tabel 3 Tabel 3. Hasil Tabulasi Skor Penilaian SPI

Tabel 4 Rincian Kategori Temuan SPI Kabupaten Lampung Timur

Tabel 5 Identifikasi Penyebab Temuan SPI pada LKPD

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kenaikan Opini Audit atas LKPD Tahun 2017-2021

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Surat Keterangan Penelitian
- Lampiran 2. Hasil Tabulasi Kuesioner SPIP Kabupaten Lampung Timur

BAB I

PENDAHULUAN

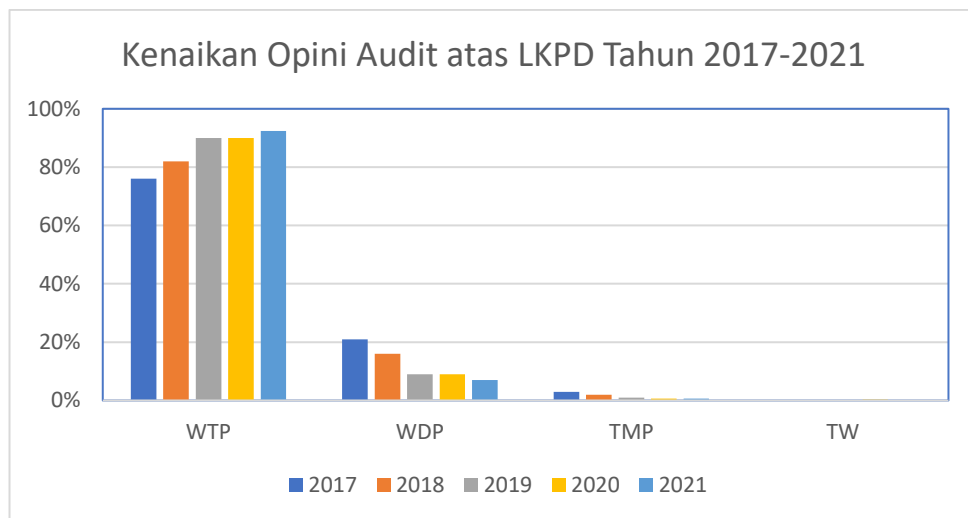
1.1 Latar Belakang

Indonesia telah menganut sistem Desentralisasi fiskal selama lebih dari dua puluh tahun. Desentralisasi fiskal di Indonesia dimulai dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah dan UU Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat Dan Daerah yang merupakan pertanda babak baru otonomi daerah melalui penyerahan kewenangan kebijakan keuangan kepada masing-masing daerah baik dari sisi pendapatan dan belanja. Pemerintah Daerah diberikan kebebasan untuk menggunakan anggaran yang tersedia sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah dan memanfaatkan kekayaan yang dimilikinya sebagai sumber pendapatan asli daerah. Tidak hanya itu, desentralisasi fiskal juga memberikan hak Pemerintah Daerah untuk menerima transfer keuangan dari pemerintahan pusat dan menentukan investasi (Muryawan dan Sukarsa, 2016). Desentralisasi fiskal menyebabkan Pemerintah Daerah dituntut untuk mandiri dalam meningkatkan pendapatan dan melaksanakan pembangunan sesuai kegiatan dan program yang direncanakan oleh Kepala Daerah.

Dukungan terhadap sistem desentralisasi fiskal juga tercermin dari dikeluarkannya UU Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara yang mewajibkan Pemerintah Daerah menyusun dan melaporkan laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik dalam pengelolaan keuangan negara dalam satu tahun anggaran. Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) harus disesuaikan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Penyusun standar ini adalah Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) yang penyusunannya mengadopsi *International Public Sector Accounting Standar* (IPSAS) dengan basis akrual.

Fungsi auditor eksternal untuk memberikan opini atas LKPD sehingga informasi keuangan disajikan secara wajar merupakan tugas dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Laporan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2021 mengungkapkan bahwa opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) diraih oleh

500 Pemerintah Daerah, opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) diraih oleh 38 Pemerintah Daerah, dan opini Tidak Menyatakan Pendapat (TMP) diraih oleh 3 Pemerintah Daerah. Selama tahun 2017-2021, opini atas LKPD mengalami perbaikan. Opini WTP mengalami kenaikan sebesar 16,4%, dari angka 76% pada LKPD Tahun 2017 menjadi sebesar 92,4% pada LKPD Tahun 2021. Sementara itu, opini WDP mengalami penurunan sebesar 14%, dimana pada tahun 2017 opini WDP mencapai 21% dan tahun 2021 hanya sebesar 7%. (BPK RI, 2021). Berikut merupakan gambaran kenaikan opini LKPD dari tahun 2017-2021.



Gambar 1. Kenaikan Opini Audit atas LKPD Tahun 2017-2021

Disamping memberikan opini, peran utama dan tanggung jawab BPK adalah mendeteksi kecurangan (*fraud*) yang berpotensi menimbulkan dampak merugikan secara material terhadap laporan keuangan pemerintah (Indra et al., 2022). Laporan IHPS I Tahun 2021 juga mengungkapkan 6.965 temuan dari 541 LKPD. Temuan tersebut memuat 11.910 permasalahan yang mencakup 5.366 temuan kelemahan sistem pengendalian intern (SPI) dan 6.544 temuan ketidakpatuhan sebesar Rp2,35 triliun. Atas temuan tersebut, BPK telah memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Daerah untuk menjalankan tindakan perbaikan untuk periode selanjutnya.

Berdasarkan data tersebut, sebesar 45,05% permasalahan di LKPD Tahun Anggaran (TA) 2022 adalah SPI. Padahal, pencegahan pertama yang dapat dilakukan untuk meminimalisir temuan adalah SPI yang baik. Adanya penerapan SPI yang efektif dari Pemerintah Daerah seharusnya mampu mendeteksi kesalahan dan kecurangan yang terjadi pada entitas. Disamping itu, SPI yang baik dapat mendukung terciptanya suatu wadah untuk mengumpulkan dan menyusun

informasi transaksi bisnis entitas yang efektif dan efisien. Lemahnya pengendalian internal akan berpengaruh pada ketidakpatuhan suatu entitas (Park et al., 2021). Dilihat dari fungsi yang dijalankan, pengendalian internal sangat penting karena mencakup pemeriksaan preventif: mencegah masalah sebelum terjadinya muncul, pemeriksaan detektif: mengidentifikasi masalah dan pemeriksaan korektif: memperbaiki kesalahan (Nugraha & Tjakrawala, 2023). Semakin baik pengendalian internal maka tingkat kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku akan meningkat sehingga akan berpengaruh terhadap opini audit yang didapatkan oleh entitas. Hasil tersebut sesuai dengan penelitian Bandiyono (2020) yang mengungkapkan bahwa pengendalian internal yang kuat akan meningkatkan opini atas LKPD. Sari dan Winarto (2020) juga mengungkapkan hal yang sama dimana penelitian mengambil sampel Kantor Akuntan Publik di Jakarta Timur.

Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan PP Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebagai dasar yang mewajibkan seluruh lingkungan Pemerintah Pusat dan Daerah untuk mengimplementasikannya. SPIP merupakan adopsi dari “*The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO)*” yang berisi lima komponen pengendalian, yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan. Kelima komponen tersebut saling terhubung satu sama lain. Terdapat perbedaan definisi dan tujuan dari keduanya. COSO (2013) mendeskripsikan SPI sebagai suatu proses dimana dewan komisaris, manajemen, dan personel lain terlibat untuk memberikan keyakinan yang memadai. Sedangkan definisi SPI menurut PP Nomor 60 Tahun 2008 adalah proses menyeluruh yang dilakukan oleh pimpinan dan pegawai secara berulang-ulang untuk memberikan keyakinan yang memadai. Tujuan dari penerapan SPI menurut COSO (2013) adalah untuk mencapai tujuan perusahaan yang berkaitan dengan operasional perusahaan, keandalan pelaporan, dan kepatuhan. Sementara tujuan dari penerapan SPIP adalah memberikan keyakinan yang memadai agar tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara tercapai secara efektif dan efisien, pelaporan keuangan pusat dan daerah yang andal, pengamanan aset negara, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Berbagai penelitian terkait implementasi SPI berbasis COSO telah banyak dilakukan. Pada sektor swasta, SPI COSO digunakan sebagai alat untuk mengevaluasi SPI yang berjalan di perusahaan. Studi yang dilakukan pada

perusahaan PT Brantas Abipraya (Persero) oleh Saputra dan Novita (2023) mengungkapkan bahwa pengendalian internal telah diterapkan sesuai dengan lima komponen SPI yang ada dalam COSO, namun perusahaan perlu melakukan langkah-langkah perbaikan agar sistem pengendalian dilaksanakan sesuai harapan perusahaan. Sementara itu, hasil penelitian yang dilakukan oleh Rumamby et al. (2021) pada PT Moy Veronika mengungkapkan bahwa implementasi COSO Framework pada PT Moy Veronika belum sepenuhnya dijalankan. Masih terdapat komponen yang belum dijalankan dan tidak sesuai dengan COSO Framework. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan Fajar dan Rusmana (2018) pada Bank BRI mengungkapkan bahwa pengendalian internal perusahaan telah mengaplikasikan konsep pengendalian COSO, namun dalam pelaksanaannya masih terdapat prinsip yang belum dijalankan secara konsisten terutama pada komponen lingkungan pengendalian dan pemantauan. Kasus *fraud* yang melibatkan pihak internal perusahaan masih terjadi. Artinya, komponen lingkungan pengendalian belum dijalankan dengan baik. Disamping itu, banyak terdapat temuan Auditor eksternal yang belum terselesaikan menandakan bahwa masih komponen pemantauan belum berjalan efektif. Braim dan Mohammed (2023) melakukan penelitian dengan membandingkan masing-masing komponen pengendalian yang ada dalam COSO Framework dengan kinerja perusahaan manufaktur yang berada di Erbil, Kurdistan. Hasil dari studi tersebut mengungkapkan bahwa keempat komponen COSO Framework yaitu lingkungan pengendalian yang terintegrasi, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, serta pemantauan berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja perusahaan manufaktur dibandingkan dengan komponen informasi dan komunikasi. Bukti serupa ditemukan di Yordania oleh Mahadeen et al. (2016) yang membuktikan bahwa pengendalian internal yang diukur dengan COSO Framework berpengaruh signifikan terhadap efektivitas kinerja suatu organisasi. Sejalan dengan penelitian tersebut, Chan et al. (2021) membuktikan bahwa masing-masing komponen pengendalian internal pada COSO Framework dapat meningkatkan inovasi yang dilakukan oleh perusahaan.

Tidak hanya pada sektor swasta, penelitian terkait SPI juga telah dilakukan pada sektor publik. Mukti (2019) melakukan penelitian penerapan SPIP pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Penelitian ini menunjukkan dua faktor kendala dalam pelaksanaan SPIP di Provinsi Jawa Tengah. Faktor tersebut berasal dari internal dan eksternal Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Adapaun faktor internal

terdiri dari *Standard Operating Procedure* (SOP) yang belum sempurna dan pemantauan dari aparat yang belum efektif, rekomendasi atas temuan yang tidak ditindaklanjuti, terlambatnya laporan keuangan, hingga permasalahan terkait Sumber Daya Manusia. Sedangkan yang menjadi faktor menjadi faktor eksternal adalah ketiadaan Peraturan Daerah yang mengatur tentang pelaksanaan SPIP. Penelitian yang dilakukan oleh Anisa dan Syarief (2020) pada Pemerintah Daerah Cimahi menunjukkan bahwa penerapan SPIP belum sepenuhnya dijalankan. Hanya ada dua unsur SPIP yang dijalankan oleh Pemerintah Kota Cimahi, yaitu informasi dan komunikasi dan pengawasan.

Penilaian efektivitas SPI juga dilakukan oleh pemeriksa BPK dalam melakukan pemeriksaan atas LKPD. Berdasarkan Keputusan BPK Nomor 1/K/I-XII.2/1/2021 tentang Petunjuk Teknis Pemeriksaan dan Nomor 2/K/I-XII.2/7/2012 tentang Petunjuk Teknis Pemahaman dan Pengujian Sistem Pengendalian Internal BPK dalam tahap perencanaan pemeriksaan, pemeriksa harus menilai efektivitas SPI secara keseluruhan diantaranya SPI tingkat entitas dan SPI Sistem Informasi Proses Bisnis Pelaporan Keuangan. Hal ini dilakukan untuk untuk menilai efektivitas pengendalian internal dari entitas yang diperiksa. Selanjutnya hasil kesimpulan dari efektivitas SPI secara keseluruhan tersebut akan digunakan untuk penetapan nilai risiko yang digunakan sebagai dasar untuk penilaian *rate Overall Materiality* (OM).

Salah satu entitas dari BPK adalah Kabupaten Lampung Timur yang terletak di Provinsi Lampung yang telah memperoleh opini WTP sebanyak lima kali berturut-turut sejak tahun 2018. Hal ini menunjukkan bahwa entitas telah berkomitmen untuk menyajikan LKPD secara wajar dengan menerapkan SPI yang kuat sehingga bebas dari salah saji material dikarenakan kecurangan (*fraud*) dan/atau kesalahan.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- a. Apakah SPI pada Kabupaten Lampung Timur sudah efektif?
- b. Bagaimana implementasi SPIP Kabupaten Lampung Timur?
- c. Bagaimana hasil analisis temuan BPK terkait SPI yang berjalan di Kabupaten Lampung Timur atas LKPD Tahun 2022?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah menilai efektifitas dan mengevaluasi SPIP pada Pemerintah Kabupaten Lampung Timur sekaligus mengidentifikasi penyebab temuan sistem pengendalian intern pada LKPD Kabupaten Lampung Timur TA 2022

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini bagi peneliti adalah

- a. Mengimplementasikan teori yang didapat saat perkuliahan;
- b. Dapat menilai efektivitas SPIP pada Pemerintah Kabupaten;
- c. Mengidentifikasi kelemahan SPIP pada suatu entitas.

Manfaat penelitian bagi objek penelitian adalah

- a. Dapat menjadi rujukan untuk memperbaiki SPIP yang berjalan;
- b. Mengidentifikasi penyebab temuan SPIP.

1.5 Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini dideskripsikan sebagai berikut:

- a. Bab I berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan;
- b. Bab II berisi landasan teori yang teori, konsep, hasil rancangan terdahulu yang mendukung bagaimanakah observasi dan evaluasi tersebut dilakukan dalam laporan akhir, serta pustaka acuan berupa *textbooks*, *ebook*, dan literatur ilmiah;
- c. Bab III menjelaskan tentang metode penelitian yang dipakai, sumber data, prosedur pengumpulan data, tehnik analisis data, pengecekan keabsahan temuan dan tahap-tahap penelitian;
- d. Bab IV berisi hasil dan pembahasan penelitian yang meliputi evaluasi, analisis dan observasi terhadap sistem, produk, kebijakan, sistem/prosedur yang telah menjadi objek penelitian;
- e. Bab Kelima berisi simpulan hasil penelitian dan saran. Simpulan berisi analisis yang dapat menjawab masalah yang disampaikan dalam Bab 1. Saran berisi implikasi hasil evaluasi/analisis sistem model, strategi, kebijakan kegiatan, dan usulan untuk pengembangan selanjutnya, serta saran bagi pengguna yang akan menggunakan hasil evaluasi atau analisis tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Anisa, V. N., & Syarief, A. (2020). Analisis Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Pada Pemerintah Daerah Kota Cimahi The Analysis of Implementation of Government Internal Control System in Cimahi City Regional Government. *Indonesian Accounting Research Journal*, 1(1), 45–52.
- Bandiyono, A. (2020). Budget Participation and Internal Control for Better Quality Financial Statements. *Jurnal Akuntansi*, 24(2), 313. <https://doi.org/10.24912/ja.v24i2.699>
- BPK RI. (2021). *Summary of Semester Audit Results I Year 2021 (Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester, IHPS I Tahun 2021)*. [https:// www.bpk.go.id/ihps](https://www.bpk.go.id/ihps)
- Braim, S. J., & Mohammed, R. B. (2023). The (COSO) Framework: Implications of Internal Control Components on the Performance Manufacturing Companies. *Qalaai Zanist Scientific Journal*, 8(1). <https://doi.org/10.25212/lfu.qzj.8.1.48>
- Chan, K. C., Chen, Y., & Liu, B. (2021). The Linear and Non-Linear Effects of Internal Control and Its Five Components on Corporate Innovation: Evidence from Chinese Firms Using the COSO Framework. *European Accounting Review*, 30(4), 733–765. <https://doi.org/10.1080/09638180.2020.1776626>
- COSO. (2013). *Internal Control-Integrated Framework*. AIGPA's Publication Division.
- Fajar, I., & Rusmana, O. (2018). Evaluasi Penerapan Sistem Pengendalian Internal Dengan COSO Framework. *Jurnal Ekonomi, Bisnis, Dan Akuntansi (JEBA)*, 20(4).
- Indra, I., Iskak, J., & Khaq, A. (2022). Enhancing the Role of the Audit Board of the Republic of Indonesia in Fraud Detection. *Jurnal Tata Kelola Dan Akuntabilitas Keuangan Negara*, 131–143. <https://doi.org/10.28986/jtaken.v8i2.935>
- Mahadeen, B., Al-Dmour, R. H., Obeidat, B. Y., & Tarhini, A. (2016). Examining the Effect of the Organization's Internal Control System on Organizational Effectiveness: A Jordanian Empirical Study. *International Journal of Business Administration*, 7(6). <https://doi.org/10.5430/ijba.v7n6p22>
- Mukti, H. H. (2019). Impementasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) Oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Inspektorat di Provinsi Jawa Tengah Berdasarkan Perspektif: PP. No 60 Tahun 2008 Tentang

- Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP). *Indonesian State Law Review*, 2(1).
- Muryawan, S. M., & Sukarsa, M. (2016). Pengaruh Desentralisasi Fiskal, Fiscal Stress, dan Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, 5(2), 229–252.
- Nugraha, M. T., & Tjakrawala, F. K. (2023). Analysis of Implementation of Internal Control based on COSO ERM Perspective (Case Study of PT JOY). *International Journal of Scientific and Research Publications*, 13(6), 146–152. <https://doi.org/10.29322/IJSRP.13.06.2023.p13821>
- Park, K., Qin, J., Seidel, T., & Zhou, J. (2021). Determinants and consequences of noncompliance with the 2013 COSO framework. *Journal of Accounting and Public Policy*, 40(6). <https://doi.org/10.1016/j.jaccpubpol.2021.106899>
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Rumamby, W. P., Kalangi, L., & Suwetja, I. G. (2021). Evaluasi Implementasi Pengendalian Internal Berbasis COSO Pada PT Moy Veronika. In *261 Jurnal EMBA* (Vol. 9, Issue 2).
- Saputra, M. A., & Novita, N. (2023). Sistem Pengendalian Internal Berdasarkan COSO Framework Pada Perusahaan Konstruksi. *Jurnal Riset Akuntansi Politala*, 6(1), 197–210.
- Sari, A. R., & Winarto, H. (2020). Pengaruh Pengendalian Internal dan Bukti Audit Terhadap Opini Audit (Studi Empiris di Kantor Akuntan Publik di Jakarta Timur). *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis Krisnadwipayana*, 7(1). <https://doi.org/10.35137/jabk.v7i1.374>
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif: (untuk Penelitian yang Bersifat Eksploratif, Enterpretif, Interaktif dan Konstruktif)* (S. Y. Suryandari, Ed.). Alfabeta.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.